

## **PUBLIKASI ILMIAH**

### **KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR DAN TNI ANGKATAN LAUT BESERTA POLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.**

**Oleh:**

**ROMULUS,SH  
A.2021131070**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH. M.Si**

**Priyo Saptomo, SH., M.Hum**

#### **ABSTRACT**

This thesis discusses the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan province, Navy and Polair West Kalimantan Based on Law No. 45 of 2009 on Fisheries. This research was conducted using the method of sociological juridical legal research. From the results of this thesis research was obtained that the implementation of the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and officer of the Navy along with Polair West Kalimantan has been very good, Supervision fishery consists of four (4) object, namely: licensing, fishing boats, territories and catching lines and fishing gear. That licensing supervision composed of: fisheries business license, business license and permit fishing vessels transporting fish. While the fishing vessel monitoring consists of: inspection at the time of arrival of the vessel, checks at the time of departure of the ship, fishing vessel di-adhock verification, and a report by watchdog. Factors affecting overlapping supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and Navy along with Polair West Kalimantan in the implementation of fisheries surveillance in the waters of West Kalimantan Province is that the breadth of the scope of the threat of disruption of maritime security, setting authority of Investigation in the Field of Fisheries Yang still partial , yet the formation of a coordination forum in the field of fisheries enforcement in west Kalimantan and the lack of facilities, infrastructure inspectors. Attempts were made in the future in order to avoid overlapping of authority is to synchronize and harmonize fisheries surveillance authority so that law enforcement goes well. Synchronization and harmonization of the authority of law enforcement can be interpreted as an attempt was made to harmonize, harmonize regulations perundang crustaceans existing or adjust authority investigations conducted by the Department of Marine and Fisheries, Army-Navy, Police and must be supported with the Financial Budget sufficient from national and regional budgets. Including the preparation of facilities and infrastructure required to implement fisheries law enforcement. In this context, should be developed principles of coordination, namely objectivity, functional, continuity, flexibility, control, supervision, communication, effectiveness, direct contact, and the interrelationships among the factors that exist that are no longer avoid overlapping authority between officers law enforcement related.

**Keywords: Surveillance Authority, Department of Marine and Fisheries, Navy  
and Polair**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas kewenangan pengawasan antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar , TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan Perwira TNI AL beserta Polair Polda Kalimantan Barat sudah sangat baik, Pelaksanaan pengawasan perikanan terdiri dari 4 (empat) objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal pengangkutan ikan. Sedangkan pengawasan kapal perikanan terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal, pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang diadhoock, dan laporan oleh pengawas. Faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut beserta Polair Polda Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan perikanan di perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut, Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Yang Masih Bersifat Parsial, belum terbentuknya forum koordinasi penegakan hukum di bidang perikanan di kalimantan barat dan minimnya sarana, prasarana petugas pengawas. Upaya dilakukan kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyerasikan, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian dan harus ditopang dengan Anggaran Keuangan yang mencukupi dari APBN dan APBD. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan. Dalam konteks ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu obyektivitas, fungsional, kesinambungan, fleksibilitas, pengendalian, pengawasan, komunikasi, efektifitas, kontak langsung, dan hubungan timbal balik di antara faktor-faktor yang ada supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum terkait.

**Kata Kunci : Kewenangan pengawasan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda**

## Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi kegenerasi.<sup>1</sup>

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Makna strategis itu tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia yang kurangnya kurang lebih 7,8 (tujuh koma delapan) juta Km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen) laut dan 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen) daratan. Perairan lautnya seluas 5,8 (lima koma delapan) juta Km<sup>2</sup>, mencakup 0,3 (nol koma tiga) juta Km<sup>2</sup> laut territorial dan 2,8 (dua koma delapan) juta Km<sup>2</sup> perairan nusantara. Serta 2,7 (dua koma tujuh) juta Km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>2</sup> Selain itu sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki 17,508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau besar dan kecil.

Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan pangkalan dimulai pada tahun 1994, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Dirjen Perikanan Nomor 320 tahun 1994 tentang Penunjukkan Petugas Pengawas Kapal Ikan dan Nomor 420 tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal Ikan, selanjutnya diperkuat dan disempurnakan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 996 tahun 1999 perihal yang sama. Sejalan dengan perkembangan kebijakan negara Indonesia pada tahun 2000, terbentuk Kementerian Eksplorasi Laut dan Perikanan yang salah satu tugas pokok dan fungsi di dalamnya adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Perlindungan yang mempunyai tugas

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*, Hal.104

<sup>2</sup> P. Martosubroto dan K. Widaa, 1990, *Pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Hayati laut di perairan Indonesia dan Pengembangan kerjasama Internasional..* Hal 3.

dan fungsi pengawasan kapal perikanan. Sebagai dasar pelaksanaan petugas pengawas perikanan di lapangan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 44/MEN/2001 tentang Pengalihan Pembinaan Teknis Pengawas Perikanan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya tahun 2002 dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.996 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan menjadi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP No.18/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan dan Nomor: KEP.03/MEN/2002 tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/DJ-SATKER PSDKP/V/2004 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian *Log Book* Perikanan dan Lembar Laik Operasional Kapal Perikanan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat optimal terutama pengawasan terhadap kapal perikanan di pelabuhan pangkalan. Pada umumnya kegiatan penangkapan dimulai dari pelabuhan pangkalan sebagai pusat dimulainya aktivitas kegiatan bagi kapal perikanan yang meliputi pengisian bahan bakar minyak, perbekalan logistik, pendaratan hasil tangkapan, pergantian ABK dan sebagainya. Pengawasan terhadap kapal perikanan dilakukan di pelabuhan pangkalan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen perijinan, pemeriksaan fisik kapal di lapangan dan alat tangkap serta ikan hasil tangkapan yang dituangkan dalam bentuk Surat Laik Operasi (SLO) sebagai dasar persyaratan penerbitan Surat Izin Belayar (SIB) dan laporan penangkapan atau *Log Book* Perikanan (LBP) pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di laut wajib diisi dengan benar oleh nahkoda. Selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan pada saat mendarat kembali ke pelabuhan pangkalan. Data dan informasi dari proses pengawasan kapal perikanan selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi terjadi pelanggaran perikanan dilakukan penyidikan.

Permasalahan yang timbul dari kinerja pengawasan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, yang meliputi sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, insentif, motivasi. Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan mengenai kinerja maka dalam penelitian ini untuk memperoleh dalam penerapannya dilakukan pengkajian berdasarkan dokumen-dokumen kapal (ship documents) yang harus ada di kapal terkait masalah

keselamatan kapal yaitu Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Syahbandar Umum ditingkat Provinsi sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, disamping itu juga dilakukan pula observasi lapangan terhadap kapal-kapal penangkap ikan di PPN Palabuhan untuk melihat kelengkapan persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh kapal dalam upaya mencapai keselamatan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan tersebut.

Di Provinsi Kalimantan Barat pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dalam rangka memberantas tindak Kejahatan di bidang perikanan yang dirasa masih sangat lemah dan adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Terkait dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum tersebut Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal, 29 Oktober 2009 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) juga sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) yang telah ada sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dianggap tidak lagi mampu mengakomodir semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan oleh suatu system Peradilan Pidana terpadu di bidang perikanan yaitu melalui pengawasan perikanan, penyidik perikanan, penuntut umum perikanan dan pengadilan perikanan. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (jaksa, hakim) yang selama ini menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan merupakan aparat penegak hukum yang juga menangani kasus-kasus tindak pidana umum, dan pada umumnya aparat penegak hukum tersebut secara teknis kurang memahami masalah-masalah perikanan sehingga menyebabkan banyaknya kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi hanya memperoleh putusan yang amat sangat ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga memuat aturan tentang hukum acara sebagai ketentuan khusus (*Lex Spesialis*) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Salah satunya factor yang menentukan berhasil tidaknya pengawasan dan penegakan hukum melalui sarana penal adalah factor penegakan hukum itu sendiri dalam hal ini penyidik yang merupakan instansi penegak hukum yang pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan), Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dinas perhubungan (syahbandar umum). Keempat instansi penyidik tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Perikanan. Yang memberikan wewenang pengawasan, penegakan hukum serta penyidikan di bidang perikanan hanya kepada penyidik perwira TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan diberi kewenangan yang terbatas dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, yakni tidak diberi kewenangan untuk penangkapan dan/atau penahanan, kewenangan hanya sebatas pada :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan pelaku pelanggaran;
3. Mengeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga di pergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran; dan
4. Melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan pelanggaran

Disamping itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan juga diwajibkan untuk :

1. Melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri;

---

<sup>3</sup> Am ir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, *Perilaku Aparat Penegak Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Keadilan , Volume I November Hal.19

2. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri;
3. Menyerahkan berkas hasil penyidik kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
4. Dalam melaksanakan tugasnya (penyidikan) sebagaimana tersebut diatas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan pelaksanaan proses penegakan hukum di bidang perikanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak dapat dilakukan secara cepat, mengingat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan terbatas. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan langkah terobosan baru untuk mewujudkan kemandirian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan selaku aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan posisinya yang sejajar dan kewenangannya yang sama yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dengan Penyidik Perwira TNI AL maupun Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan secara mandiri.

Dalam upaya penanganan *illegal fishing* yang telah merugikan negara yang sangat besar, maka perlu dilakukan penanganan segera dan prioritas. Penanganan tersebut sulit dilakukan sendiri-sendiri khususnya Departemen atau Dinas Kelautan dan Perikanan, akan tetapi harus dilakukan secara terpadu dan bersama dengan berbagai unsur keamanan di laut, seperti Tentara Nasional Indonesia –Angkatan Laut, POLAIR, Bea Cukai serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan kehakiman didalam melakukan proses peradilan. Oleh karena itu peran instansi terkait tersebut sangat diharapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan guna menunjang pengamanan, penertiban dan penegakan hukum dalam bidang perikanan. Berkenaan dengan itu, maka dalam upaya meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dilakukan kerjasama operasi di lapangan dan proses peradilan terhadap para pelaku tindak pidana perikanan.

Dalam upaya membangun perikanan yang tertib dan bertanggung jawab harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan internasional, agar Indonesia terhindar dari tuduhan-tuduhan yang menyatakan tidak mampu melaksanakan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab. Sedangkan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan dan/atau kegiatan di laut antara lain adalah: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya, termasuk Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaringan Trawl.

*Illegal Fishing* seperti yang digambarkan di atas juga terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan ini terdapat beberapa tindakan yang harus dikaji secara mendalam apakah termasuk tindak pidana di bidang perikanan atau tidak. Terkait dengan *Illegal fishing* oleh orang dan/atau kapal asing, tindak pidana yang terjadi biasanya menyangkut, penangkapan ikan tanpa izin, izin yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pemalsuan izin, penangkapan menggunakan bahan peledak, jaring trawl dan/atau menggunakan alat penangkapan yang dilarang yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, penangkapan ikan oleh kapal yang tidak dilengkapi dokumen, dan lain sebagainya.

Dalam upaya penyelesaian kasus atau penegakan hukum terhadap orang dan/atau kapal asing banyak faktor yang ikut mempengaruhi, dan terkadang banyak kasus yang diselesaikan secara nonyustisial (seperti deportasi). Dalam penanganan tindak pidana oleh orang/kapal asing memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga masa penahanan sudah melampaui ketentuan, dan apabila dikeluarkan dari tahanan menjadi beban sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang asing tersebut. Selain itu masalah penanganan barang bukti juga menjadi kendala, kapal-kapal asing yang ditahan sebagai barang bukti sulit untuk dijaga, sehingga ada kapal yang tenggelam atau alat yang dicuri, dirusak, dan lain sebagainya.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan penangkapan orang dan/atau kapal asing ini adalah bahwa terdapat penangkapan kapal asing yang tidak dapat dibuktikan adanya barang bukti berupa ikan atau sejenisnya yang ditangkap, sehingga sulit untuk menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan tidak cukup bukti yang menjurus/mengarah pada terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*. Selain itu dalam penangkapan kapal asing tidak hanya mengarah pada pelanggaran ketentuan di bidang perikanan, tetapi juga terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lain, seperti keimigrasian, dan lain sebagainya.



Dalam hal ini, penyelesaian tindak pidana perikanan kapal asing di wilayah Kalimantan Barat masih menyisakan berbagai problem, sehingga muncul berbagai pertanyaan, seperti siapa atau instansi mana yang berwenang menangani tindak pidana perikanan kapal asing tersebut, bagaimana mengatasi/menangani orang asingnya, barang bukti, dan lain sebagainya.

Permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan pencurian ikan mengakibatkan dibutuhkanannya semacam perangkat perundang-undangan yang jelas dalam mengatur hal tersebut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia antara lain harus segera memiliki undang-undang kelautan untuk menyelesaikan tumpang-tindih kewenangan yang kerap terjadi di sektor tersebut.

Bangsa Indonesia dituntut untuk segera memiliki undang-undang kelautan sebagai payung hukum bagi pengaturan laut secara terpadu. Saat ini, RUU Kelautan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2013 dan menjadi inisiatif DPR, sedangkan penyiapan bahan naskah akademik, batang tubuh dan penjelasannya oleh Dewan Perwakilan Daerah didukung Dewan Kelautan Indonesia.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : **Kewenangan Pengawasan Antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar , TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut serta Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut serta Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut serta Polair kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ?

### C. Kerangka Teori

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari timbulnya perbedaan interpretasi, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa istilah berikut pengertian dan teori-teori terkait, yaitu pengertian penegakan hukum di laut, pengertian kewenangan, koordinasi, pengawasan dan aparat penegak hukum di laut, tindak pidana dan pelanggaran di laut, serta pengertian perairan Indonesia dan zona tambahan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum di Laut

Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Suryono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara dan mempertahankan (control) perdamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata<sup>4</sup>. Dalam Buku Seminar Hukum Laut Kelima Tahun 1990 dinyatakan bahwa dalam pengertian penegakan hukum tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya<sup>5</sup>. Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau

---

<sup>4</sup> Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 NO. 2, 1998, hal 49

<sup>5</sup> Seminar Hukum Nasional Kelima, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990, hal 168

badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Pengertian penegakan hukum di satu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan serentak. Dengan demikian adanya perbedaan penegakan hukum dengan penegakan kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan<sup>6</sup>.

Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum tersebut bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negaranegara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh<sup>7</sup>, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional<sup>8</sup>. Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negaranegara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum<sup>9</sup>.

Dengan demikian, penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya

---

<sup>6</sup> Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998, hal 50

<sup>7</sup> Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektoral), Buku II B, Dep Hankam, 1980, hal 3

<sup>8</sup> Bernard Kent Sondakh, Jurnal Hukum Internasional 2004, hal 13

<sup>9</sup> Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektoral, Buku II B, Dep Hankam, Jakarta 1980, hal 3

bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan pengejawantahan kedaulatan<sup>10</sup>.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut dibedakan antara (i) fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut, dan (ii) fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut<sup>11</sup>. Pelaksanaan penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana (*lex specialis*)<sup>12</sup>. Mengacu pada ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana umum (yang tercantum dalam KUHP) yang terjadi di laut, maka aparat penegak hukum di laut mempunyai kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya diselesaikan dalam kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu termasuk pasalpasal tertentu dalam KUHP, maka aparat penegak hukum tindak pidana umum mempunyai kewenangan sebagai penindak awal, yang selanjutnya diselesaikan aparat penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut.

Dilihat dari bidang kegiatannya, maka penyelenggaraan penegakan hukum di laut dapat dipilah secara berurutan, yaitu bidang polisionil dan bidang yustisial (penyidikan). Dalam bidang polisionil dilakukan operasi laut sehari-hari (keamanan laut) melalui pengendalian/ pengawasan ditaatinya peraturan perundang-undangan nasional. Apabila dalam operasi laut tersebut ditemukan pelanggaran terhadap hukum nasional, maka perkaranya diselesaikan melalui penyidikan yang merupakan kegiatan bidang yustisial<sup>13</sup>. Dalam pengertian yutisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan pengertian di atas, maka penyelenggaraan penegakan hukum di laut adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal termasuk menaiki kapal (*boarding*) dan pemeriksaan

---

<sup>10</sup> Bernard Kent Sondakh, *Jurnal Hukum Internasional*, 2004, hal 14

<sup>11</sup> Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990, hal 173

<sup>12</sup> *Ibid*, (Lihat Pasal 284 (2) KUHP, yaitu mengenai ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu masih tetap berlaku sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi).

<sup>13</sup> *ibid*, hal 174

(investigasi dan inspeksi), dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana, sedangkan penyelesaian lebih lanjut dilaksanakan di darat<sup>14</sup>.

Penegakan hukum di laut sangat diperlukan bagi pengamanan di laut mengingat adanya berbagai bentuk ancaman atau gangguan terhadap kegiatan penggunaan atau pemanfaatan laut, antara lain:

- a. Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.
- b. Ancaman Navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut, yang memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer, misalnya dalam sengketa kepulauan.
- d. Ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain<sup>15</sup>.

## **2. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan hukum, yaitu tindakan-tindakan untuk mengambil kebijaksanaan atas hak-hak yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum di laut<sup>16</sup>.

Secara garis besar, kewenangan instansi-instansi yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut meliputi, (i) kewenangan penyidikan, (ii) kewenangan penuntutan, dan (iii) kewenangan peradilan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### **a. Kewenangan Penyidikan**

Menurut para pakar penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu yang dilakukan setelah diketahuinya

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 170

<sup>15</sup> Didik Heru Purnomo, Pengamanan Laut RI Bagian Barat, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 32

<sup>16</sup> pm

akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, dimana penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penerapan hukum pidana dan bersifat represif. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun masih sementara sifatnya, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangka<sup>17</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang (jelas) tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana. Oleh karena itu penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup pula kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan kejahatan atau pelanggaran di laut dapat langsung seketika mengambil tindakan untuk diperlukan bagi terangnya perkara.

Dalam Buku Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang tertentu.

Pengertian penyidikan menurut Protap adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai KUHAP dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu dan ditujukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan TNI AL tidak mengenal Locus Delicty dalam arti kapal/tersangka dapat dibawa ke

---

<sup>17</sup> Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990, hal 191

pelabuhan terdekat atau di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

**b. Kewenangan Penuntutan**

Kewenangan penuntutan adalah kewenangan penuntutan umum untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan berdasarkan hasil penyidikan tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, aparat penegak hukum yang tugas utamanya sebagai penuntut umum adalah kejaksaan. Dengan demikian kewenangan penuntutan adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

**c. Kewenangan Peradilan**

Kewenangan Peradilan adalah wewenang pengadilan yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kehadapannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman. Menurut pasal 1 undang-undang ini kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sesuai pasal 18 pengadilan mempunyai kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Kewenangan badan peradilan ini juga mencakup kasus-kasus tindak pidana dan pelanggaran di laut. Jika kesulitan dalam menentukan hukum peradilan negeri mana yang berwenang untuk menangani akibat terjadinya kejahatan dan pelanggaran di laut, maka digunakan ketentuan dalam Pasal 85 dan 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**3. Konsep Pengawasan**

Menurut Mardiasmo,<sup>18</sup> ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu : “pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan”. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah.

---

<sup>18</sup> Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, AND1, 2002, Hlm. 219.

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Selain pengertian pengawasan di atas, terdapat sejumlah batasan atau definisi senada tentang pengawasan yang dikemukakan oleh pakar hukum administrasi maupun pakar ilmu administrasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Prajudi Atmosudirdjo, berpandangan: “pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan, hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan apakah sebab-sebabnya”.<sup>19</sup>
- b. Menurut Paulus Effendi Lotulung, Pengawasan (control) terhadap pemerintah, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>20</sup>
- c. Begitu pula menurut S.F. Marbun,<sup>21</sup> bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah bertujuan : “untuk menjaga agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik dan tetap dalam batas kekuasaannya”.
- d. Selanjutnya Sarwoto memberikan batasan tentang pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.<sup>22</sup>
- d. Sondang P. Siagian, mendefinisikan: “pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

---

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 233.

<sup>20</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. xvi – xvii.

<sup>21</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997, Hlm.. 12.

<sup>22</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988. Hlm. 93.



pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".<sup>23</sup>

- e. Sedangkan L.D. White menyatakan : "tujuan daripada pengawasan adalah untuk menjaga agar supaya jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia".<sup>24</sup>
- f. Suryanto, mendefinisikan "pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak".<sup>25</sup>
- g. Anthoni F. Susanto,<sup>26</sup> mendeskripsikan pengawasan adalah : "segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Simpulan umum yang dapat ditarik dari definisi tentang pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas, adalah, berfungsi untuk mengetahui apakah suatu program atau kegiatan yang sudah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan ataupun organisasi lainnya telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, memperbaiki dan/atau menindak segala bentuk penyimpangan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **4.. Pengertian Koordinasi**

Koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, yaitu upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Pengertian kegiatan keamanan laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara rutin dan fungsional oleh masing-masing instansi sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Sondang P. Siagian. Filsafat Administrasi, Gunung Agung : Jakarta, 1970, Hlm. 107. Lihat pula, Ny. A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Semarang : Badan Penerbit Unuversitas Diponegoro, 1993, Hlm. 61.

<sup>24</sup> Ny. A. Siti Soetami, *Ibid*.

<sup>25</sup> Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta : Liberty , 1992, Hlm. 37.

<sup>26</sup> Anthoni F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, 2004, Hlm. 51.

yang dimaksud dengan operasi keamanan laut adalah upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan secara khusus dan untuk sasaran atau tujuan tertentu oleh masing-masing instansi yang berwenang (operasi keamanan laut mandiri) dan/atau oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Menurut pasal 13 Peraturan Presiden ini Bakorkamla mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### 4. Pengertian Aparat Penegak Hukum Di Laut

Pengertian aparat penegak hukum di laut secara garis besar terdiri dari perwira TNI AL dan pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk, Polri, kapal perang, kapal pemerintah dan pangkalan-pangkalan udara sebagaimana dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam tabel pada halaman berikut<sup>27</sup>.

No	Aparat Penegak Hukum	Peraturan Perundang-undangan
	Komandan Angkatan Laut, Komandan Kapal Perang Negara, pangkalan udara Angkatan Laut, Nakhoda kapal Ditjen Perla, orang-orang yang berada di bawah perintah panglima, komandan-komandan, perwira Ditjen Perla,	Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (TZMKO 1939 Stbl 1939 Nomor 442
	Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 4, pasal 6 ayat 1 dan pasal 17)
	Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang No 5/83	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (Pasal 14)

<sup>27</sup> Lihat Protab, hal 5-6-7

	Pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Pasal 31 ayat 1)	
	Pejabat-pejabat terkait, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Pasal 107, 110, 111 dan 224)
	Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, tanpa mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 39 ayat 2)
	Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan yang diberikan wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana	Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (pasal 79)
	Penyidik Pejabat Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran, perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan tindak pidana	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Pasal 99)
	Pejabat Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang penyidik vide Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (pasal 47)
	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik vide Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (pasal 112)

	TNI AL, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai <del>dengan kewenangan masing-</del>	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Pasal 24 ayat 3)
	Para penyidik menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal ayat 5, lihat pasal 14 ayat
	Polri memegang peranan utama dalam penyelidikan & penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI (pasal 14 ayat 1)
	Tentara Nasional Indonesia	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 14)
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (pasal 73 ayat 1)

## F. Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik observasi dan teknik wawancara dan juga menggunakan teknik kuesioner. Sedangkan analisa data yang diperoleh, melalui teknik analisis kualitatif, yang dilakukan secara rasional dengan menggunakan data-data yang diperoleh.

### 1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari responden yang dipilih yaitu:

- 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar
- 2) Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar
- 3) Kepala Syahbandar Umum Propinsi Kalbar
- 4) Dirpolair Polda Kalbar
- 5) Penyidik TNI AL

#### b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data Sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan jalan dan lalu lintas dan angkuatan jalan, serta dokumen--dokumen dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian data melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan, literatur serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar wawancara sebagai pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban terbuka.

## **3. Analisis Data**

Analisis masalah dan korelasinya dengan data yang dihimpun akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yuridis dan sosiologis kualitatif.

## **Pembahasan**

### **Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut Beserta Polair Polda Kalimantan Barat.**

Pengawasan di bidang kelautan dan perikanan khususnya pada sektor penangkapan ikan selain dilakukan oleh pengawas perikanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pengawasan penangkapan ikan juga dilakukan oleh beberapa instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut (bakamla) yang dahulunya bernama bakorkamla, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI AL).

Kerja sama antar lembaga di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan dengan satu atau lebih lembaga/ badan/ atau organisasi yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama yang memberikan hasil yang baik untuk semua pihak.

Efektivitas kerja sama atau koordinasi antara PSDKP dengan instansi lainnya seperti bakamla, TNI AL, Polri diakui oleh Gatot Rudyono<sup>28</sup> selaku Kepala dinas kelautan dan perikanan Pemprov Kalbar ialah sudah sangat baik. Selain itu, khusus pengawasan di laut, DitjenTahun 2008, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 76 yang kemudian terdapat 36 kapal ikan Indonesia dan 40 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 18 kapal. Kemudian pada tahun 2009, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 32 Selanjutnya hasil operasi bersama Polri, diperiksa 17 unit kapal yang kemudian ditangkap 10 kapal ikan Indonesia dan 7 kapal ikan asing. Bersama TNI AL, diperiksa 9 kapal yang kemudian ditangkap 3 kapal ikan asing. Tahun 2010, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 35 yang kemudian terdapat 10 kapal ikan Indonesia dan 25 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 14 kapal. Tahun 2011, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 48 yang kemudian terdapat 37 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 8 kapal.

Tahun 2012, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 53 yang kemudian terdapat 12 kapal ikan Indonesia dan 41 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 16 kapal. Tahun 2013, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 20 yang kemudian terdapat 17 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 4 kapal. Tahun 2014, jumlah kapal yang diperiksa berdasarkan hasil operasi bersama bakorkamla ialah sebesar 33 yang kemudian terdapat 26 kapal ikan asing yang ditangkap. Selanjutnya hasil operasi bersama TNI AL, diperiksa 3 kapal. Hasil operasi kapal pengawas Ditjen PSDKP dengan instansi terkait berdasarkan wilayah operasi (Tahun 2007-2014). Di mana untuk tahun 2007, terdapat 18 kapal yang ditangkap di Laut Karimata Tahun 2008, terdapat 16 kapal yang ditangkap di Laut Natuna Tahun 2009, terdapat 14 kapal yang ditangkap di Laut Natuna Tahun 2010, terdapat 12 kapal yang ditangkap di Laut Karimata dan 3 kapal ditangkap di Laut Natuna

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2011, terdapat 9 kapal yang ditangkap di Laut Natuna Selat Malaka Tahun 2012, terdapat 6 kapal yang ditangkap di Laut Karimata dan 2 kapal ditangkap di laut Jawa Tahun 2013, terdapat 14 kapal yang ditangkap di Laut Natuna. Selanjutnya tahun 2014, terdapat 23 kapal yang ditangkap di Laut Natuna. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah yang paling banyak ditemukan (ditangkap) ialah wilayah Laut Natuna dan Karimata.

Kerja sama yang terjalin antar instansi atau lembaga ini merupakan suatu wujud keseriusan seluruh *stake holders* untuk menjaga dan memelihara serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Mengingat semboyan Negara Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang dapat diartikan bahwa walaupun instansi yang bekerja sama ini berbeda dalam struktur maupun organisasi, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum. Hal ini juga merupakan salah satu amanat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Khusus untuk Daerah Propinsi Kalimantan Barat Masalah penegakan hukum di laut, tidak hanya menyangkut penegakan hukum perikanan, tetapi juga terkait dengan penegakan keamanan laut. Karena itu, permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum perikanan secara nasional juga berhimpitan dengan permasalahan yang dihadapi di daerah. Faktor dominan yang menyebabkan tumpang-tindih atau belum efektifnya pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

### **1. Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut**

Keamanan Laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut, yaitu : <sup>29</sup> Pertama, laut bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisasi dengan kekuatan bersenjata ancaman tersebut dapat berupa : pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata. Kedua, laut bebas dari ancaman navigasi, yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Ketiga, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem laut serta

---

<sup>29</sup> DISPENAL. Keamanan Laut Tanggung Jawab Siapa? : Hakikat dan makna Laut bagi bangsa Indonesia, Artikel, Jakarta, 2002.

eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Keempat, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, *penyelundupan* dan lain-lain. Karena itu, dalam proses penegakan hukum tindak pidana perikanan, berbagai bentuk ancaman keamanan laut di atas juga bisa berhimpunan dengan terjadinya tindak pidana perikanan. Sehingga proses penegakan hukumnya juga harus melibatkan beberapa penyidik dari beberapa departemen terkait dan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Dengan kata lain, memerlukan koordinasi dan keterpaduan penanganan dan penindakan.

## **2. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Bersifat Parsial**

Pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih bersifat parsial sehingga menimbulkan kerancuan :

- 1) Di satu sisi berdasarkan KUHAP Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap terhadap semua tindak pidana umum maupun khusus yang terjadi di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai Koordinator dan Pengawas PPNS.
- 2) Namun ternyata untuk tindak pidana perikanan, penyidik POLRI hanya diberikan kewenangan terbatas. Penyidik POLRI tidak memiliki kewenangan penyidikan di wilayah ZEEI dan Pelabuhan Perikanan. Padahal, di dalam kasus tindak pidana perikanan, bisa terjadi bentuk-bentuk tindak pidana umum lainnya, seperti : pemalsuan surat/dokumen, narkoba, imigrasi, dan aspek pengamanan yang menjadi bidang tugas POLRI.
- 3) Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah territorial Indonesia (12 Mil Laut NKRI, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman) sepenuhnya merupakan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan.
- 4) Sedangkan di wilayah ZEEI menjadi kewenangan TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan.

Sehingga, dalam praktik penegakan hukum perikanan, masih belum terjalin keterpaduan penegakan hukum yang harmonis antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Akibatnya, masalah penegakan hukum di bidang perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, belum dapat ditegakkan secara maksimal. Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat di atas, bahwa selama kurun waktu dari tahun 2001 sampai dengan bulan April 2014, telah banyak tertangkap di perairan Kalimantan barat, kapal nelayan asing berikut ABK yang. Demikian pula di tingkat nasional, selama kurun waktu tahun 2010 s/d 2014 telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan oleh Departemen Kelauntan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel :1

**Tabel : 1.**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran dan Jenisnya Tahun 2008 s/d 2014**

<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahun - Year</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Tanpa ijin	25	8	7	4	-
Alat tangkap terlarang	10	3	9	-	7
Tanpa ijin dan alat tangkap	-	37	41	17	26
Pemalsuan Dokumen	4	-	4	-	3
Dokumen tidak lengkap	4	4	-	-	-
Penyetruman (ACCU)	-	-	-	-	-
Bahan Peledak / Bom	6	4	8	3	-
<b>Jumlah - Total</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>36</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat

Di samping perkembangan penanganan tindak pidana perikanan, output spesifik yang dihasilkan oleh Ditjen P2SDKP melalui kegiatan penanganan pelanggaran adalah berupa kapal yang dirampas untuk negara. Sejak tahun 2010 s/d tahun 2014 jumlah kapal yang dirampas untuk negara dengan rincian sebagai disajikan pada Tabel : 2

**Tabel 2**  
**Jumlah Kapal yang Dirampas untuk Negara Tahun 2008 s/d 2014**

Provinsi	Tahun - Year				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah – Total	-	-	-	-	-
Sumatera	32	41	44	43	39
Jawa	57	51	48	52	28
Bali – Nusatenggara	14	8	17	21	9
Kalimantan	48	57	69	48	42
Sulawesi	27	35	39	48	42
Maluku - Papua	36	44	53	18	22

Sumber: Data Departemen Kelautan Dan Perikanan 2014.

### **3. Belum Terbentuknya Forum Koordinasi Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan di Kalimantan Barat**

Sebagaimana diketahui, menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005, tanggal 10 Oktober 2005, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
- b. identifikasi jenis, modus operandi, volume dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- c. penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- d. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- e. analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan;
- f. perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- g. perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- h. pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan pengkayaan dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Susunan keanggotaan Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan pada Tingkat Pemerintah Pusat terdiri dari :

1. Ketua oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Wakil Ketua I oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
3. Wakil Ketua II oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Sekretaris I Merangkap Anggota oleh Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
5. Sekretaris II Merangkap Anggota oleh Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
6. Anggota terdiri dari :
  - a. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI;
  - b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Kepolisian Negara RI;
  - c. Dirjen Imigrasi, Departemen Hukum & HAM;
  - d. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
  - e. Dirjen Bea Cukai, Departemen Keuangan;
  - f. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - g. Direktur Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.<sup>30</sup>

Selanjutnya Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan di Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait di Propinsi atau Kabupaten/Kota setempat.<sup>31</sup>

Meskipun menurut sambutan Gubernur Kalimantan Barat menyambut baik pertemuan pada Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada tanggal 21 April 2014, namun sampai kini Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan di Kalimantan Barat masih belum terbentuk.

Padahal, untuk mengefektifkan koordinasi yang harmonis antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (DKP), Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia saja sudah mengalami berbagai hambatan teknis dan kewenangan. Terutama kaitannya dengan aktivitas patroli, pola penyidikan, penindakan,

---

<sup>30</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/MEN/2005, tanggal 10 Oktober 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

<sup>31</sup> Pasal 7.

proses BAP, penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum, dan sebagainya. Apalagi, potensi munculnya kecenderungan ego sektoral juga bisa mengedepan karena masing-masing institusi merasa memiliki kewenangan penuh di wilayah kerjanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Sementara, secara teknis (mikro) sampai kini belum ada peraturan pelaksanaan yang secara jelas mengatur batas-batas kewenangan tersebut.

#### **4.Minimnya sarana, prasarana petugas pengawas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gatot Rudyono<sup>32</sup> selaku Kepala dinas kelautan dan perikanan Pemprov Kalbar, bahwa salah satu yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan penangkapan ikan adalah perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai berarti mereka yang mengerti dan memahami dengan baik tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan.

Selain memahami tugas, perangkat hukum tersebut juga harus berani menjalankan kewenangannya tanpa mau diintervensi dengan pihak lain yang beritikad buruk. Dan selalu berpegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan yang sejatinya merupakan manifestasi bagi kemajuan Indonesia ke depannya. Aparat penegak hukum seperti pengawas perikanan, TNI AL maupun Polri yang notabnya diakui oleh kasubag hukum ditjen psdkp sebagai aparat yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan salah satunya pada bidang penangkapan ikan ini, seyogyanya tidak boleh puas karena disadari atau tidak, situasi dan kondisi terus berkembang sehingga tidak tertutup kemungkinan kedepannya aparat hukum ini dapat saja menjadi boomerang bagi penegakan hukum itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya pada proses penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentunya harus memiliki landasan atau pedoman dalam setiap tindakan. Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Di lingkup kementerian kelautan dan perikanan, biro hukum dan organisasi mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Terkait tugas itu, Kepala Bagian PerUU Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum laut, menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah *dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji*

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat

*publik (sebelum, sesudah, dan selama proses) dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.*<sup>33</sup>

Khusus mengenai penegakan hukum perikanan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Barat, juga dapat dikatakan masih mengalami cukup banyak kendala, antara lain :<sup>34</sup>

- a. minimnya sarana dan petugas pengawas serta luasnya wilayah pengawasan ;
- b. berkorelasi dengan geografi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah 146.807 Km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 821 Km<sup>2</sup>;
- c. terdapatnya pulau-pulau kecil sebanyak 153 buah dengan luas wilayah laut 54.705,6 Km<sup>2</sup>;
- d. ditambah wilayah perairan umum dengan luas 2.825 Km<sup>2</sup>;
- e. diperberat oleh posisi laut Kalimantan Barat yang meliputi selat Malaka dan berfungsi sebagai jalur transportasi internasional serta berdekatan dengan laut Cina Selatan; dan
- f. adanya kegiatan *illegal fishing* menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan baik oleh nelayan lokal maupun asing, yang tidak hanya menguras kekayaan perairan Kalimantan Barat tetapi juga mengancam kelangsungan hidup biota laut.<sup>35</sup>

Selain itu, potensi konflik horisontal antara nelayan Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya bisa muncul sewaktu-waktu, berkenaan dengan batas wilayah perairan 4 mil laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi wilayah operasi penangkapan ikan para nelayan di setiap wilayah Kabupaten/Kota.<sup>36</sup>

Kondisi itulah yang cukup menyulitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan TNI Angkatan Laut Pontianak untuk dapat memonitoring ataupun menindak secara efektif berbagai bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Kalimantan Barat.

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Fuad Himawan (Kabag PerUU Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut ,Biro Hukum KKP RI dalam acara kunjungan menteri perikanan dan kelautan RI di Pontianak).

<sup>34</sup> Keterangan Ditpolair Polda Kalbar , Dalam Rangka HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pontianak Post.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **Upaya-Upaya Dilakukan Kedepannya Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kewenangan.**

Sesuai dengan lingkup dan identifikasi permasalahan seperti tersebut dalam Bab Pendahuluan serta masukan dari hasil penelitian, maka analisis dalam penelitian ini mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh Instansi terkait sebagai berikut:

### **1 Masalah Penegakan Hukum Di Laut**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, penegakan hukum di laut telah diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien serta dengan tingkat keberhasilan seoptimal mungkin, namun dalam berbagai hal ternyata pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi tantangan, kendala dan masalah yang cukup serius, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, baik dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing melalui pendaratan langsung ke negara asal (transshipment) dan kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, serta penggunaan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>37</sup>.

Demikian juga tindak kriminal lainnya di dan lewat perairan Indonesia dan zona tambahan sulit diberantas bahkan beberapa jenis tindak pidana dan pelanggaran semakin meningkat dengan menggunakan teknologi yang canggih, seperti perompakan yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Disadari bahwa penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana dan pelanggaran sejenis yang terjadi di daratan mengingat medannya yang luas dan terdiri dari perairan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan dalam penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan sangat ditentukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang khusus dan tepat, serta didukung aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai baik medan yang sangat luas dan penuh tantangan tersebut maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu yang juga sangat penting adalah tersedianya peraturan-perundang-undangan yang dapat menampung permasalahan dan perkembangan yang ada. Tanpa dukungan ketiga instrumen pokok tersebut, maka sasaran dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Perairan Indonesia dan zona tambahan tidak sepenuhnya dapat

---

<sup>37</sup> Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hal 108 - 109

tercapai.

Dari hasil penelitian akibat dari tumpang tindih kewenangan tersebut terlihat bahwa penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan masih dirasakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, utamanya berkaitan dengan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasionalisasi penegakan hukum di laut yang dirasakan masih belum memadai, dibandingkan baik dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia dan zona tambahan yang perlu dicakup dan dijangkau.

## 2. Masalah kewenangan

Masalah kewenangan yang perlu diteliti adalah melihat apakah kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya kewenangan masing-masing instansi telah cukup jelas pemilahannya, dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya masing-masing. Namun dalam praktek di lapangan masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam penyidikan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan, akibat ketidakjelasan mengenai instansi mana yang mempunyai kewenangan.

Kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia yang tumpang tindih tersebut tentunya dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien, dan bahkan ada kemungkinan suatu masalah atau tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dan zona tambahan tidak ditangani karena tidak ada instansi terkait yang merasa mempunyai kewenangan untuk menanganinya. Namun untuk penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan .

Untuk itu Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penyidikan dan penuntutan tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyerasikan, menyelaraskan atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian. Bahkan juga dengan Instansi terkait lainnya, seperti : Bea Cukai, Imigrasi, Syahbandar, Karantina, KAMLA, dan Dinas-Dinas Perikanan di Daerah.

### 3 Masalah Koordinasi

Permasalahan yang diteliti adalah apakah koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah terlaksana secara nasional terpadu.

Dari uraian dalam bab-bab terdahulu diketahui bahwa ada tingkatan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, yaitu (i) koordinasi pada tingkat pengambilan kebijaksanaan dan (ii) koordinasi dalam pelaksanaannya yang mencakup koordinasi dalam kewenangan hukum dan koordinasi pada tingkat operasional di lapangan. Koordinasi dalam kewenangan hukum adalah koordinasi antara instansi penyidik, penuntut dan badan peradilan. Baik proses dan mekanismenya sudah cukup jelas pengaturannya dan sejauh ini tampaknya telah berjalan dengan baik. Namun yang adakalanya masih menimbulkan kerancuan adalah koordinasi yang sifatnya operasional. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dipandang masih perlu ditingkatkan dan perlu ada suatu wadah koordinasi yang jelas.

Adanya pendapat ini menimbulkan pertanyaan mengingat telah adanya Bakorkamla, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, yang berfungsi mengkoordinasikan upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing instansi terkait berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melihat bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan baik penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu, maka seyogianya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Namun tampaknya tidaklah demikian karena pada umumnya para aparat penegak hukum terkait belum memahami dengan jelas keberadaan Bakorkamla. Kemungkinan kurangnya sosialisasi dilingkungan pihak-pihak terkait, dan dari aspek yuridis belum ada peraturan pelaksanaan yang dapat mengefektifkan badan ini agar dapat berfungsi secara nasional. Selain itu, jika badan setingkat Bakorkamla telah ada namun dirasakan masih perlu ada wadah koordinasi lainnya, kemungkinan selain Bakorkamla masih dibutuhkan juga wadah koordinasi pada tingkat operasional (di lapangan). Maksudnya koordinasi dalam melaksanakan operasi keamanan laut oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat



dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Menurut pasal 13 Peraturan Presiden ini Bakorkamla mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Persoalannya adalah apakah penyelenggaraan rapat-rapat termaksud sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, dalam penelitian ini hal tersebut belum terungkap mengingat terbatasnya waktu dan lingkup penelitian.

Kemudian, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tersebut, perlu ditopang dengan pembentukan forum koordinasi penanganan penegakan hukum perikanan di tingkat Pusat dan Daerah. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tingkat Pusat yang sudah ada tentunya perlu ditingkatkan kinerjanya dengan cara:

- 1) Menyusun rencana program kegiatan penyidikan di bidang perikanan dalam kurun waktu Lima Tahun dan Tahunan;
- 2) Menyusun identifikasi jenis, modus operandi, volume dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- 3) Menentukan penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4) Menyusun rencana program penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Melakukan analisis, identifikasi, dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan;
- 6) Melakukan perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan kejahatan di bidang perikanan;
- 7) Membuat perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Melakukan pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan pengkayaan dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

#### 4. Masalah Aparat Penegak Hukum Terkait

Permasalahan yang diteliti adalah apakah kemampuan para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah memadai, termasuk kemampuannya dalam penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan .

Dari tanggapan terhadap kuesioner yang diajukan kepada instansi terkait dinyatakan bahwa kemampuan para aparat penegak hukum telah memadai, karena pada umumnya mereka telah dibekali pendidikan dan pelatihan teknis serta diklat pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang instansi masing-masing. Jika kemudian terjadi penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tidak optimal, hal ini disebabkan masalah koordinasinya yang belum berjalan sebagaimana mestinya seperti dijelaskan di atas.

Untuk itu selayaknya di wilayah Provinsi yang sudah dibentuk pula Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan struktur yang serupa di tingkat Pusat, serta Rencana Program Koordinasi Pusat, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum yang melaksanakannya.

Tentu saja, Rencana Program tersebut perlu ditopang dengan Anggaran Keuangan yang mencukupi dari APBN dan APBD. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan tindak pidana perikanan. Dalam konteks ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi : Obyektivitas, Fungsional, Kesenambungan, Fleksibilitas, Pengendalian, Pengawasan, Komunikasi, Efektifitas, Kontak Langsung, dan Hubungan Timbal Balik Di Antara Faktor-Faktor Yang Ada.

## 5. Masalah Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perairan Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Diantaranya, pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan masih dirasa kurang, sehingga di beberapa daerah mengalami tekanan over fishing yang melampaui daya dukung perairan. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Kondisi ini mendorong nelayan setempat melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti pengeboman, penggunaan potasium, pengambilan terumbu karang dan melanggar daerah penangkapan serta melakukan penangkapan ikan di daerah lain yang disebut nelayan andon. Sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang selama ini diterapkan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan sehingga belum dapat mengurangi pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan dan daerah penangkapan secara drastis. Lemahnya sistem pengawasan antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana,

prasarana, biaya dan petugas pengawas sumber daya ikan dan penerapan Monitoring, Control and Surveillance (MCS) yang belum dilaksanakan secara terpadu.

Selain itu, akibat adanya pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal-kapal perikanan asing dan kapal asing berbendera Indonesia yang tidak terkontrol, maka Pemerintah Indonesia dituduh seakan-akan tidak dapat mengelola pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab karena mengeksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan, sehingga diprotes secara internasional yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi, antara lain harus membayar iuran internasional (fee) dan embargo perdagangan. Untuk melengkapi gambaran masalah pengawasan penegakan hukum di laut, perlu dikemukakan juga bahwa masalah pelanggaran perizinan untuk beroperasi di ZEE Indonesia sangat tinggi, diduga saat ini sebagian besar (70%) dan sekitar 7000 kapal perikanan berbendera Indonesia yang memperoleh izin masih dimiliki oleh pihak asing terutama Thailand, Filipina, Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Ini merupakan eksese dan kebijakan deregulasi Perikanan 1996, yang substansinya membuka kran impor kapal ikan bekas dan sekaligus menutup diberlakukannya sistem sewa (charter) kapal penangkap ikan asing sampai dengan akhir tahun 1999. Deregulasi yang bertujuan untuk lebih mengembangkan armada perikanan nasional tersebut justru dapat dimanfaatkan secara tidak baik oleh para pengusaha yang bergerak dibidang perikanan yang tidak bertanggungjawab bersama dengan mitra asingnya, yaitu dengan menyalahi celah hukum yang ada dengan cara merubah status kapal asing menjadi kapal berbendera Indonesia dengan berbagai modus operandi, yaitu dengan berupapura pihak asing memiliki hutang kepada mitra bisnisnya di Indonesia yang melalui putusan pengadilan dengan delik perdata, dinyatakan pihak asing diharuskan membayar hutangnya dengan cara menggunakan kapal ikan eks carter yang telah habis izinnya, atau kapal ikan eks carter atau kapal yang baru dimasukkan dari luar negeri dikamuflase seolah-olah kapal produksi dalam negeri dan lengkap dengan dokumen kapal (Sertifikat Pembangunan Surat ukur, Gross Akte dan sebagainya) di dalam negeri, atau impor kapal secara fiktif, impor kapal dengan harga yang semurah-murahnya dan sebagainya.

Selain aspek kelembagaan pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di daerah, maka diperlukan juga adanya perangkat pengaturan yang menyangkut aspek kewenangan pengawasan. Jadi disamping adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikanan, perlu disusun peraturan yang mengatur tentang kelautan termasuk

didalamnya pengawasannya.

Dalam rangka peningkatan pengawasan, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan sistem pemantauan kapal yang disebut Vessel Monitoring System (VMS) yang dapat mempermudah inspeksi kapal ikan dengan cara mengidentifikasi kapal ikan, memonitor posisi kapal, aktifitas kapal, jenis dan jumlah kapal serta informasi lainnya. Dengan cara ini pergerakan kapal dapat dimonitor setiap saat sehingga bila terjadi pelanggaran dapat cepat diketahui dan cepat dilakukan penindakan. Sebagai landasan hukumnya, telah dikeluarkan suatu keputusan, yaitu , namun tampaknya keputusan ini belum tersosialisasi, karena dari hasil penelitian umumnya instansi terkait belum memahami adanya sistem ini di Indonesia.

#### 6. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Permasalahannya adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang timbul, termasuk perkembangan teknologi yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum di laut.

Dilihat dari landasan hukum penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, terlihat bahwa ketersediaan peraturan perundang-undangannya sudah cukup memadai, baik yang berlingkup nasional maupun yang secara khusus mengatur aspek-aspek sektoralnya. Namun yang masih menjadi kendala adalah masalah yang bersifat teknis operasional, artinya dilihat dari pelaksanaannya tampaknya masih belum dilaksanakan secara harmonis dan terkoordinasi secara menyeluruh, untuk itu penulis menilai harus ada aturan turunan yang mengatur masalah teknis operasional tersebut. Untuk itu perlu adanya harmonisasi antara aparat penegak hukum terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tersebut.

### **Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan Perwira TNI AL beserta Polair Polda Kalimantan Barat sudah sangat baik, Pelaksanaan pengawasan perikanan terdiri dari dari 4 (empat) objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal pengangkutan ikan. Sedangkan pengawasan kapal perikanan terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal,

pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang di-adhock, dan laporan oleh pengawas.

2. Faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut beserta Polair Polda Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan perikanan di perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut, Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Yang Masih Bersifat Parsial, belum terbentuknya forum koordinasi penegakan hukum di bidang perikanan di kalimantan barat dan minimnya sarana, prasarana petugas pengawas.
3. Upaya dilakukan kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyerasikan, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian dan harus ditopang dengan Anggaran Keuangan yang mencukupi dari APBN dan APBD. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan. Dalam konteks ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu obyektivitas, fungsional, kesinambungan, fleksibilitas, pengendalian, pengawasan, komunikasi, efektifitas, kontak langsung, dan hubungan timbal balik di antara faktor-faktor yang ada supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Alma Manuputty dkk. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Makassar: Arus Timur.
- Amir Syamsuddin, *Perilaku Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vol.1
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1997
- Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.\
- Heru Prijanto. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayumedia.
- Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AND1, 2002
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P. Martosubroto dan K. Widana, 1990, *Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut di Perairan Indonesia dan Pengembangan Kerjasama Internasional*, Makalah Seminar Hukum Nasional V, Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, 1998, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia,.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

- Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. Filsafat Administrasi, Gunung Agung : Jakarta, 1970, Hlm. 107.  
Lihat pula, Ny. A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993,
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Sudirman Saad. 2003. *Politik Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat,, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Supriadi dk. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Viktor M.
- Wirjono Pridigoro, 1992, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung.